

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
UANG PANAİK DI DESA GANTARANG KECAMATAN
KELARA KABUPATEN JENEPONTO**



Proposal

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.SH) pada Jurusan Perbandingan Madhzaḇ dan Hukum
Fakultas Syariaḥ dan Hukum Uin Alauddin Makassar**

OLEH

SUGIANTO HS

NIM: 10300115072

**JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUGIANTO HS

NIM : 10300115072

Program Studi : Jurusan Perbandingan *Madzhab* dan Hukum

Fakultas : *Syariah* dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
UANG PANAIK DI DESA GANTARANG
KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, Agustus 2020

Yang menyatakan,

(SUGIANTO HS)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupatenn Jeneponto** ” yang ditulis Oleh, Nama: **Sugiato HS** , NIM: **10300115067**, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan Pada Hari Senin Tanggal 25 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 15 Maret 2021 M

1 Syakban 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatia HL, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Wahid Haddade, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Abd. Rahman Qayyum, M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
NIP: 19561231198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat yang tak terhitung jumlahnya, *maghfirah* dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan *Madhazab* dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020, dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang *Panaik* di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono” dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ayahanda **H. Sesedan** ibunda **Hj. Ringgi**, serta keluarga atas do’a, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan harapannya. Sungguh jasa kalian tidak akan pernah mampu terbalaskan.

Terima Kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. H. Abd Wahid Haddade, Lc., M.H.I**, selaku pembimbing pertama yang telah membimbing dan memberikan motivasi, dan Ibu **Drs. Nila Sastrawati, M.Si**, selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta kritik dan sarannya dalam penyusunan Skripsi ini.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang memberi bantuan, baik moril maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Dr. H. Muammar Muhammad Bakri. Lc., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh staf atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku Ketua Jurusan dan Bapak **Dr. Abdi Wijaya, SS., M.Ag.** selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madhazab dan Hukum (PMH) serta staf atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Staff yang senantiasa mengajar, mendidik, dan membina kami untuk menjadi mahasiswa hukum yang profesional.
5. Semua tokoh masyarakat dan para pelaku informan Uang *Panaik* yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang telah diketahui.
6. Sahabatku dari Jeneponto, Rafa, Sri Rahma, dan Chaves yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis.
7. Semua teman-teman seangkatan 2015 Fakultas Syariahdan Hukum yang senantiasa saling mengisi, memotivasi, dan memberikan dukungan ditengah kesibukan menjadi mahasiswa tingkat akhir.

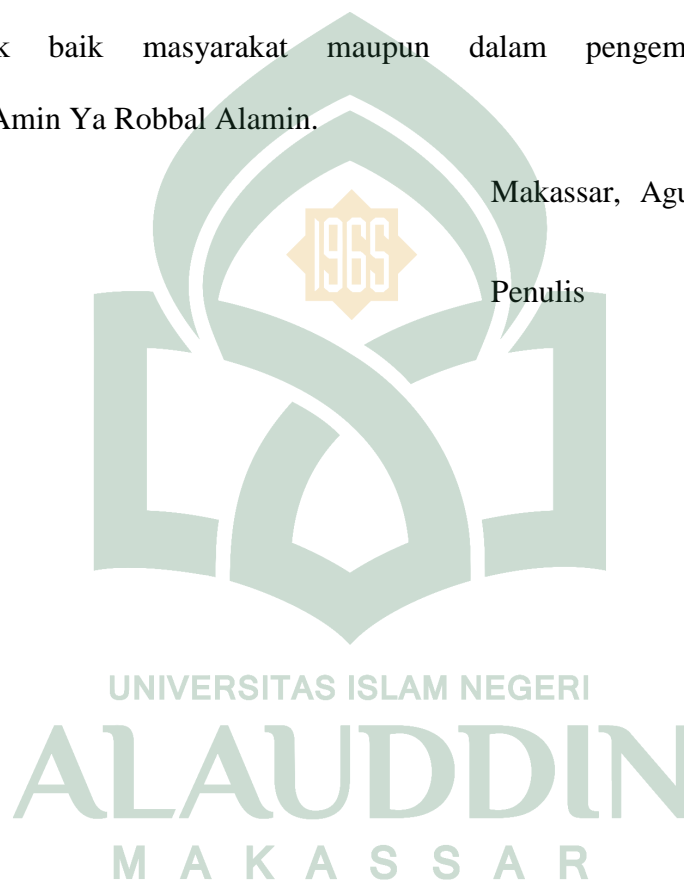
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik serta tanggapan yang membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik masyarakat maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Robbal Alamin.

Makassar, Agustus 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Sosiologi Hukum Islam	11
B. Perkawinan Dalam Hukum Islam	18
C. Uang <i>Panaik</i>	38
D. Fungsi Sosial Mahar dan Uang <i>Panaik</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian	50

F.

Teknik Pengolahan
Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN53

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53

B. Kedudukan Uang *Panaik* 56

C. Hukum Islam tentang Uang *Panaik* 68

BAB V PENUTUP.....76

A. Kesimpulan.....76

B. Implikasi Penelitian 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

NAMA : SUGIANTO HS
NIM : 10300115072
JUDUL : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang *Panaik* di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap uang *panaik* di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, selanjutnya rumusan masalah sebagai berikut: 1) Mengetahui bagaimana kedudukan uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, 2) Menganalisis dengan hukum Islam tentang uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian *deskriptif*, metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Imam desa, Tokoh masyarakat, dan warga setempat selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan uang *panaik* dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sudah menjadi tradisi kebiasaan yang turun-temurun atau tradisi mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Persepsi masyarakat uang *Panaik* itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita untuk dipergunakan dalam menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat mengadakan pesta pernikahan. Masyarakat di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, uang *panaik* itu sudah menjadi hal yang lumrah dimana pihak wanita yang berhasil mematok uang *panaik* yang tinggi maka menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga. Begitu pun sebaliknya dengan laki-laki, kalau uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat disanggupi oleh pihak keluarga maka menjadi kebanggaan bagi keluarganya dan kerabat dimana hal ini dipandang sebagai praktik budaya yang sudah dianutnya selama ini.

Hukum Islam tentang uang *panaik* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang *panaik* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya *mubah*, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Maka dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan kemampuan.

Implikasi Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bahwa: Dalam menentukan uang *panaik* seharusnya, disesuaikan dengan kemampuan bagi pihak laki-laki agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan. Penetapan jumlah uang *panaik* hendaknya pihak laki-laki harus memahami keadaan keluarga mempelai wanita dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (*walimah*) uang *panaik* berada pada posisi yang wajar untuk diterima. Seperti halnya di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang keadaan masyarakatnya sangat peka terhadap kebersamaan, solidaritas yang masih terjaga, maka jumlah uang *panaik* yang tinggi adalah salah satu hal yang wajar. Perkawinan adalah salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Maka, dalam hal menyelenggarakan pernikahan sebaiknya nilai agama yang ditonjolkan, meskipun secara adat tidak bisa ditinggalkan secara keseluruhan, yang penting alurnya tidak bertentangan dengan norma-norma atau hukum Islam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Manusia menentukan berbagai perjanjian agar hidup bersama itu menguntungkan keduanya, menguntungkan bagi masyarakat, dan juga menguntungkan bagi kehidupan masing-masing. Manusia sebagai makhluk sosial, di samping memiliki hasrat untuk hidup secara individual, manusia juga menunjukkan gejala-gejala sosial, manusia senang hidup bersama orang lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil, yang menyatakan manusia adalah "Zoon Politicon" yang berarti bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau juga disebut sebagai makhluk yang sosial.¹

Pernikahan adalah suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir ataupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Memang jika kita membicarakan tentang pernikahan selalu menarik karena pernikahan itulah yang melahirkan keluarga dan sebagai tempat seluruh kehidupan manusia berputar.²

Pernikahan adalah sunnah (wajib) dalam Islam untuk menghindarkan keluarga dari fitnah. Namun, bagaimana pernikahan itu mendapat hidayah dan berkah Allah swt, salah satunya adalah nikah dilangsungkan tanpa memberatkan salah

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta .1989) h. 29

satunya adalah nikah dilangsungkan tanpa memberatkan salah satu mempelai. Di Kabupaten Jeneponto, tidak jarang uang *panaikitu* dikonotasikan sebagai mahar. Adapun mahar dalam Islam memang wajib tetapi jika itu merupakan pemberian benda seperti emas, atau paling tinggi rumah dan tanah, bukanlah hal yang wajib di dalam Islam. Faktanya terkadang ada pihak perempuan yang meminta kepada pihak laki-laki uang *panaik* yang sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya, jika hal ini terjadi dapat berpotensi menimbulkan dosa.

Menikah diharamkan bagi seorang lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai isteri dan anak-anaknya, atau dia menderita penyakit yang cukup gawat dan akan menular kepada isterinya dan keturunannya. Menikah juga dapat menjadi makruh bagi seorang lelaki yang tidak mempunyai dorongan seksual sama sekali atau tidak memiliki rasa cinta kepada anak-anak, atau di yakini akan mengakibatkan lalai dalam berbagai kewajiban agamanya yang diakibatkan oleh menika tersebut.

Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Saw. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat² tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa, dalam hukum Islam, kata perkawinan di kenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh (ajaran) agamanya, yang separoh lagi, hendaklah ia *taqwa* kepada Allah, demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan itu akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang di larang Allah.

Munculnya undang-undang perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanggal 1 januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah di kumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian susul menyusul dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama diperuntukkan bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak disusun dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan bagi orang Indonesia asli yang beragama islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih (kitab-kitab hukum fikih Islam), menurut sistem hukum di tanah air kita tidaklah dapat di golongankan ke dalam kategori

²

Kementrian Agama RI, *Alqur'andan Terjemahnya* (PT. PATJA CEMERLANG 2014). h.125

hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan undang-undang.³

Berdasarkan pernyataan tersebut yakni hukum perkawinan islam hanya tercantum dalam kitab-kitah fikih yang didalamnya terdapat rukun dan syarat pernikahan dimana kedua hal ini adalah penentu yang sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum islam. Rukun perkawinan secara lengkap yaitu sebagai berikut: calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Sebelum prosesi pernikahan atau *pa'buntingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, sekaligus penentuan pemberian uang *panai* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan apabila lamaran tersebut di terima.

Uang *panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.

Masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono menganggap bahwa pemberian Uang *panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada Uang *panaik* berarti tidak ada perkawinan.

Masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20

Jenepontoberanggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan uang *panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara uang *panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang *panaik* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang *panaik* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika uang *panaik* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.

Jika dalam perkawinan adat suku lain uang *panaik* tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat suku bugis Makassar. Istrijustru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan uang *panaik*. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. Uang *panaik* tersebut tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun. Karena uang *panaik* tersebut khusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.

Uang *panaik* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang *panaik* dimulai dari 25 juta, 50 dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.

Terkadang karena tingginya uang *panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi “uang *panaik*” yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut silariang atau kawin lari.

Adapun penyebab tingginya jumlah uang *panaik* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: Status sosial calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula uang *panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah uang *panaik* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakintinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula uang *panaik* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang *panaik* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Karena masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepontoberanggapan bahwa keberhasilan mematok uang *panaik* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya uang *panaik* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepontosejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan islam tidak ada kewajiban untuk memberikan uang *panaik*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologis Hukum Islam di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejarah pemberian uang *panaik*
2. Penjelasan tentang uang *panaik*
3. Proses pemberian uang *panaik*
4. Posisi uang *panaik* dalam persyaratan
5. Pentingnya uang *panaik*
6. Kegunaan uang *panaik*
7. Orang yang berhak menerima uang *panaik*
8. Dampak tingginya uang *panaik*
9. Akibat tidak mampu memberikan uang *panaik*

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penelitian ini membatasi masalah yakni: Bagaimana perihal pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang uang *panaik* dalam

perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Desa Gantarang
Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu bagian yang bertujuan untuk menguraikan perbedaan buku maupun karya tulis ilmiah terdahulu dengan penelitian ini. Berikut beberapa uraian tentang buku atau karya tulis ilmiah terdahulu.

1. Skripsi oleh Suria Nensi Mahasiswa Jurusan sosiologi Agama Fakultas Usuludin dan Filsafat yang berjudul: Persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang panai pada adat pernikahan di desa tanete kabupaten gowa. Dalam skripsi ini menerangkan penentuan mahar masyarakat desa tanete yaitu lebih dominan mengikuti ketentuan adat dari pada agama tapi tidak terlepas dari nilai-nilai Islam.
2. Skripsi oleh Imam Ashari Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, dalam skripsi ini menerangkan tentang mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak biasanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Dan tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seseorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya, semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut.
3. Skripsi oleh Fatimah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang *Dui'*

Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis. Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat bugis khususnya di Kabuapten Soppeng dan Kabupeten Bulukumba menganggap bahwa pemberian *Dui' menre* adalah tradisi pemberian uang yang wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Tujuannya untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan *Dui' menre* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu praa syarat, karena jika tidak ada *Dui' menre* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *Dui' menre* akan tetapi hukumnya mubah. Islam tidak melarang pemberian *Dui' menre* dalam perkawinan adat bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang penting pemberian *Dui' menre* tidak bertentangan dengan *syari'at* dan penentuan nilai *Dui' menre* tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Adapun dampak dari tingginya penentuan jumlah *Dui' menre* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggang, banyak laki-laki yang enggan menikah, banyak perawan tua, silariang, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja menghamili perempuan yang mau dinikahinya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

- a) Mengetahui bagaimana kedudukan uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
- b) Menganalisis dengan hukum Islam tentang uang *panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan demi terbukanya wawasan dan pengetahuan berpikir dalam kajian mengenai Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Uang *Panaik*.

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta di lapangan dalam meningkatkan daya kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan. Khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lainnya yang berkaitan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih di fahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Berkait dengan satu ilmu, maka sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hokum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi

4
hukum.

Wiliam komblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untu mempelajari masyarakat dan prilaku social anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbalik balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

4

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat setia, 2016) h. 7.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁵

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atasesuatu شىء, sedangkan menurut istilah, ialah Khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad saw. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁶

Jadi, dari pemaparan dsosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbale balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁷

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁸

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat

⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1989) h. 11.

⁶

⁷ Mohamad Rifa'i *Usul Fikih* (Bandung : Al Ma'arif, 1990) h. 5.

⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat setia, 2016) h 18.

Admin "Pegertian Sosiologi Hukum Islam" <https://www.suduthukum.com/2017/05/>. Diakses 11 Juli 2020.

dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai *barometer yuridis* setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata-negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), *feminisme*, *kontrasepsi*, *demokratisasi* dapat dianggap sebagai bahan kajian para *fiqh kontemporer* dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁹

Atho" Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-

negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.¹⁰

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama

atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat *urbanisme Kufah* telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syâfi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan *sufisme* misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.¹¹

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan

¹¹ M. Rasyid Ridla, *Jurnal*, 297-298.

dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- 2) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- 3) Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Aspek sosiologi terkait dengan sebab-sebab, faktor-faktor, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan

hukum maupun yang menyimpang dari hukum.¹² Menurut Peter Berger dan Lukman, berfikir secara sosiologis berarti memiliki logika berfikir di antara orang awam dan filosofis yang menganggap semua hal sebagai aspek atau fakta sosial yang akan diperlukan sebagai objek yang diamati, dipahami, dideskripsikan,

dianalisis kemudian disimpulkan.¹³

Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka pendekatan sosiologis

¹² Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h. 113.

¹³ Heru Nugroho, *Ide-ide Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 85.

akan membawa pemahaman bahwa ternyata bagian dari penetapan hukum Islam itu didasari oleh berbagai aspek sosiologis masyarakat. Karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional tentang hukum Islam. Karena hukum Islam merupakan hasil kerja para ahli *fikih* terdahulu dalam memecahkan persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat, gambaran tentang kemampuan syariat Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan dengan beberapa prinsip syariat Islam tentang tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan tuhan, dan secara horizontal antara sesama manusia.¹⁴

B. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dhan” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian nikahan.¹⁵ Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti

¹⁴ Achamd Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Cet. I. Makassar: Alauddin university Press, 2012), h. 77-80.

¹⁵ Dr. Abd Shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Cet ke-1; Jakarta Kencana 2010), h. 272.

¹⁶ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai pustaka, 1994).

persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti nikah.

Berdasarkan rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai berbagai aspek baik secara hukum, sosial dan agama. Aspek hukum dalam perkawinan di pahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian perkawinan mempunyai tiga sifat yaitu:

- a. Sebaiknya dilangsungkan dengan persetujuan dua belapihak.
- b. Penentuan tata cara pelaksanaan dan pemutusannya jika itu tidak dapat diteruskan atau dilangsungkan.
- c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata perjanjian juga mengandung unsur kesegajaan, sehingga untuk menyelenggara perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas dan tidak dilaksanakan secara diam-diam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peran penting dalam hidup dan perkembangan bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah dalam Q.s Adz Dzariyaat (51):/49

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
 17
 mengingat akan kebesaran Allah.

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi

¹⁷
 Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (PT. PATJA CEMERLANG 2014) h.522.

ke generasi berikutnya.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.¹⁸

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah.¹⁹

Dari kelima macam diatas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh

Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut: a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan

¹⁸ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Cet.ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam berbuat zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan. e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.

Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁰

3. Tujuan, Rukun, dan Syarat Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggotakeluarga.

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi 5 yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat ibadah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang

²⁰ Moh. Saifullah Al-aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2006), 475.

di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satusatunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing. Sedangkan masing- masing orang mempunyai kebebasan perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan

21

bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c. Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu lah menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

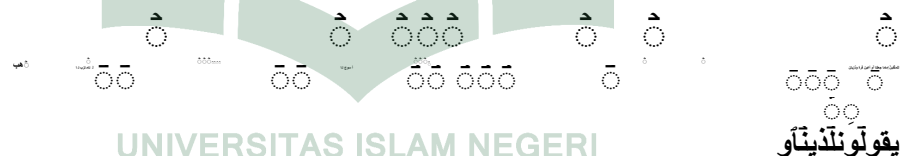
Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif

dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemudapemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat mejadi faktor yang terpenting dalam ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Dengan demikian tujuan perkawinan menurut Islam adalah tersalurnya naluri seks kedua insan yang berlainan jenis secara sah, sehingga keduanya dapat melestarikan kehidupannya, Allah swt berfirman dalam QS. Al-furqan/25:74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

يقولون لندينّاو

Artinya: Dan orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.²²

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang tujuan dari perkawinan penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketentuan Allah yang maha Esa, yang dibangun atas dasar cinta dan kerelaan dua

²² Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (PT. PATJA CEMERLANG 2014) h. 366

insan untuk membina dan membangun sebuah rumah tangga. Rukun perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi dalam sebuah perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan

²³
Khoil Rahman. 1) Calon mempelai pria

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jenis orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinannya yaitu:

- a) Beragama meskipun Yahudi atau Nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah

Wali adalah salah satu rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima

²³ Ahmad Rofiq, M.A. *HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Cet 3; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71-72

dan tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyatakan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Adapun syarat-syarat wali yaitu:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwaliannya
- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

4) Saksi nikah

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah dan ulama' Jumhur berpendapat bahwa pernikahan ke cualidengan jelas dalam pengucapan Ijab dan Qabul dan tidak boleh dilaksanakan dengan saksi-saksi hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang banyak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu ditempat akad nikah dilangsungkan.²⁴ Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi, yaitu:

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa

²⁴ M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012), h. 21

5) Ijab dan Qabul

Akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 27 ayat 1 Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang waktu. Pasal 28 ayat 1 akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Pasal 29 ayat 1 yang berhak mengucapkan Ijab calon mempelai pria secara pribadi.

Jadi, pada dasarnya, Ijab dan Qabul yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan Qabul oleh mempelai laki-laki, merupakan bentuk kerelaan antar dua belah pihak membentuk sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila dipenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). Halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nika* atau *Tazwij*.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu:
calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dalam undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dari beberapa pendapat pada uraian sebelumnya tentang perkawinan banyak terdapat perbedaan dari segi konteks tetapi secara substansi adalah sama bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian antara pria dengan seorang wanita, guna untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam. Perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian dalam perkara muamalah akan tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut Sayuti Talib dan Muh.

²⁵ Muhammad Al Jabri, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 1-3

Idris Ramulyo perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:

a. Perkawinan dari segisosial

Perkawinan dari segi sosial adalah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga dianggap memiliki kedudukan yang terhormat.

b. Perkawinan dari segiagama.

Perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci lagi baik, karena itu tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan

institusi perkawinan.²⁶ Seperti hanya dalam agama Islam yang memandang bahwa pernikahan itu adalah bukti kebijaksanaan Allah swt dalam mengatur mahlukNya, dalam Q.s An-Najm/53,45.

وَالَّذِي يُدْخِلُ الْأَزْوَاجَ يُدْخِلُكَ الْأَزْوَاجَ
وَالَّذِي يُدْخِلُ الْأَزْوَاجَ يُدْخِلُكَ الْأَزْوَاجَ
وَالَّذِي يُدْخِلُ الْأَزْوَاجَ يُدْخِلُكَ الْأَزْوَاجَ
وَالَّذِي يُدْخِلُ الْأَزْوَاجَ يُدْخِلُكَ الْأَزْوَاجَ

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.”²⁷

Ayat di atas menyatakan kepada kita, bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materi dan spiritual. Oleh sebab itu, selain sebagai sunnatullah yang bersifat kodrati, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnahRasul-Nya.

c. Perkawinan dari segi hukum

Perkawinan dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek

²⁶

Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (PT. PATJA CEMERLANG 2014) h 528



hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

Al-Qur'an menjuluki perkawinan sebagai Mitsaqan Ghalizhan, artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggengannya guna untuk mewujudkan perjanjian yang kuat. Sebelum akad nikah dilaksanakan ada kegiatan pernikahan yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, baik mempelai laki-laki maupun perempuan.²⁸

Kegiatan pernikahan yang dimaksud ialah apa yang umum dikenal sebagai muqadimah nikah yaitu perihal pemilihan pasangan suami istri.²⁹

4. Hikmah Perkawinan

Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya yang sudah mapan untuk segera membentuk rumah tangga, karena perkawinan merupakan perkara yang mempunyai banyak hikmah, diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai Kebutuhan Biologis

Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut.³⁰

b. Membentuk Keluarga Mulia

Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Sabda Rasulullah dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu'anhu, dia berkata:

“Rasulullah Shallaahu'alahi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikailah perempuan

²⁸ Husain Mazhahiri, *Bunga Dalam Rumah Tangga* (Jawa Barat: Cahaya, 2001), h.70

²⁹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 34

³⁰ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h.

yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban”.³¹

c. Naluri kasih sayang

Tumbuhnya naluri kebakikan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya bisa diwujudkan melalui perkawinan.

d. Menumbuhkan Tanggung Jawab

Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga

e. Memperteguh silaturahmi

Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelangengan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

f. Menundukkan Pandangan

Islam mendorong untuk segera menikah jika sudah mempunyai kemampuan terhadap itu karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.

Dari uraian tersebut penulis memahami bahwa hikmah dari perkawinan adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk membentengi diri, dalam menjalani hidup dan kehidupan sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif, serta sekaligus suatu bentuk pemantapan pendewasaan karena adanya kesadaran akan hak dan

kewajiban yang harus terbangun dalam rumah tangga.

Sedangkan Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi; yaitu melakukan hinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kepasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi,

akan merusak peraturanalam.

- 6) Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidakmungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal ini dikehendaki agama manusia.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih dari pada berbuat baiksedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika mati terputuslah semua sama perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap masih tertinggal meskipun ia telahmati.³²
- 9) Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh salinglengkap-melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 10) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan membawa seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 65-68

dikaruniai Allah untuk kepentingan hidup manusia.

- 11) Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan dan memperoleh kesegaran kembali.³³ Sebagaimana

diketahui publik, pernikahan bukan sekedar memenuhi hasrat biologis, melainkan nikah juga merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Karena itu hikmah perkawinan bagi seorang muslim dan masyarakat pada umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya.

Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain yaitu:

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

- c) Naluri kebaikan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbesar produksi.
- e) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanganitugas-tugasnya.
- f) Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *Nasional* terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami isteri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami isteri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang”.³⁴

C. Uang Panaik

1. Pengertian Uang Panaik

Suatu pernikahan dalam adat Bugis-Makassar diiringi dengan sejumlah uang pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu *sunrang* yang secara simbolis berupa sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan derajat perempuan dan uang *panai* yang digunakan untuk biaya pernikahan.

Istilah uang *panaik* dalam adat perkawinan/pernikahan di Sulawesi Selatan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panai* dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai* ini jumlahnya ditentukan oleh pihak dari calon mempelai perempuan, besarnya uang *panai* tergantung dari kedudukan keluarga perempuan pada masyarakat setempat.³⁵

Besar kecilnya uang *panai* tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah uang *panaik* terkadang menjadi kendala sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.³⁶

Uang *panaik* selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang *panai* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tak jarang pembatalan pernikahan, bahkan terkadang terjadi kawin lari atau *silariang* disebabkan oleh tidak disanggupinya permintaan dari pihak perempuan.

³⁵ Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 21.

³⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah SUL-SEL* (Makassar : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006), h. 37.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahar dan Uang Panaik Penentuan

mahar dan uang *panai*''pada adat pernikahan masyarakat tidak terlepas dari beberapa faktor. Selanjutnya mengenai tingkatan mahar dan uang *panai*'' agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mahar dan uang *panai*'' pada masyarakat antara lain:

a. Stratifikasi Sosial

Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal pelapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam meruakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Disaat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.

Pelapisan sosial ini memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti pernikahan. Demikian halnya dalam penentuan mahar dan uang *panai*'', karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaan keluarga. Penggunaan tingkatan mahar dan uang *panaik*'' disamping sebagai implikasi klasifikasi masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin perempuan menurut adat berdasarkan keturunan. Namun hal tersebut mulai bergeser, sehingga stratifikasi sosial masyarakat Bugis Makassar tidak lagi diukur dari kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai perempuan.

b. Adat Istiadat

Dalam segala tempat dan waktu, manusia terpengaruh oleh adat istiadat

lingkungannya, karena dia hidup dalam lingkungan, melihat dan mengetahui, dan melakukan perbuatan. Sedangkan kekuatan memberi hukum kepada sesuatu belum begitu jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan sesuatu disesuaikan dengan

adat istiadat daerah setempat.³⁷

c. Permasalahan mengenaimahar

1) Membayar kontan atau menghitung mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, calon mempelai laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedangkan sisanya saya akan membayarnya dalam waktu setahun”. Beberapa pendapat mengenai hal tersebut:

Imam Hanafi mengatakan, tergantung pada tradisi yang berlaku. Harus dibayar kontan manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Menurut Imam Hanafi, bila mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan “separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi saya hutang.” Maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan.

Imam Maliki berpendapat bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.

Imam Syafi’I mengatakan bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati, atau jatuh talak), maka mahar

³⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*,) h. 10.

musammany fasid dan ditetapkan mahar *mitsil*.

2) Ketidak sediaan istri untuk digauli hingga dia menerimamahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri berhak menuntut seluruh mahar yang dibayar kontan kepada suami dengan semata-mata terjadinya akad, dan dia berhak menolak digauli sebelum mahar tersebut diterimahnya. Akan tetapi bila ia rela digauli sebelum menerima mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Abu Hanifah-Hanifah mengatakan bahwa, dia berhak menolak digauli sesudah menerimanya.

Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa, penyerahan mahar harus didahulukan daripada penyerahan diri calon mempelai wanita. Dengan demikian, suami tidak boleh mengatakan, “saya tidak akan menyerahkan mahar sebelum saya menggauli istri saya.” Kalau dia tetap bersiteguh, dia diharuskan memberikan nafkah. Kemudian bila ia telah menyerahkan mahar si istri tetap tidak mau digauli, maka si suami tidak boleh menarik kembalimaharnya.

Imam Hambali berpandangan lain bahwa, si suami dipaksa terlebih dahulu menyerahkan mahar, tetapi bila si istri tetap tidak bersedia digauli sesudah ia menerima maharnya, maka si suami berhak mengambil kembali mahar

38 3) Ketidak mampuan suami membayarmahar

Beberapa pandangan mengenai Ketidakmampuan suami membayar mahar
Yaitu sebagai berikut:

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka si istri tidak boleh mem-*fasakh* perkawinan, dan hakim pun tidak boleh menjatuhkan cerai atasnya. Istrinya berhak untuk tidak bersedia digauli saja.

Maliki mengatakan, apabila telah terbukti bahwa suami betul-betul tidak mampu membayar mahar, sedangkan belum pernah mencampuri istrinya, maka hakim harus memberi waktu penundaan yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk melunasi hutang maharnya itu. Kalau ia tetap juga tidak mampu, hakim bias menetapkan cerai atas istrinya. Sedangkan apabila istrinya sudah digauli, maka istrinya tidak berhak mem-*fasakh* nikah sama sekali.

Syafi'i berpendapat bahwa, manakala betul-betul terbukti bahwa si suami kesulitan membayar mahar dan dia belum pula mencampuri istrinya, maka istri berhak mem-*fasakh* perkawinan, tapi apabila sudah dicampuri, dan tidak lagi berhak atasitu.

Hambali berpandangan lain, bahwa si istri berhak mem-*fasakh* sekalipun sudah dicampuri sepanjang dia tidak tahu tentang kesulitan tersebut sebelum perkawinan. Sedangkan apabila ia mengetahui hal tersebut sebelum perkawinan, dia tidak berhak atas *fasakh*, dan dalam kasus ketika *fasakh* diperbolehkan, maka yang berhak melakukan *fasakh* adalah hakim.

4) Hikmah mahar

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika ia telah menerimanya, hal itu berarti ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa mahar itu adalah lambing atau tanda cinta calon suami terhadap calon istrinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya.

Pada masa Jahiliyah, hak perempuan (berupa mahar) ini disia-siakan bahkan dihilangkan, sehingga mahar yang seharusnya menjadi milik dari seorang

perempuan malah diserahkan kepada ayahnya atau (walinya) yang lalu menggunakannya dengan semena-mena sesuai dengan keinginannya. Lalu Islam datang menggugurkan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang sangat tidak patut dan salah.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, salah satu hikmah pemberian mahar dalam prosesi pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya mawaddah yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami istri dan juga sebagai simbol rasa cinta serta kasih sayang sang suami terhadap istrinya.

Dengan adanya kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon istrinya merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab qabul, maka seluruh beban kekeluargaan termasuk memberi nafkah-lahir batin kepada istri adalah sudah menjadi tanggungjawab oleh suami, juga dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pendamping hidupnya dengan segala kelabihan dan kekurangannya adalah juga sudah dibebankan kepada sang suami.³⁹

D. Fungsi Sosial Mahar dan Uang Panaik

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi orang Bugis-Makassar pernikahan bukan hanya peralihan dalam arti Biologis, tetapi lebih penting ditekankan dalam atri Sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, pernikahan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmah dan dirayakan dengan pesta yang meriah.

Mahar dan uang *panaik* adalah termasuk urutan-urutan pada persyaratan

yang berkaitan dengan soal pernikahan/perkawinan, perbesanan dan kekerabatan dimanapun. Tapi banyak orang yang salah paham tentang fungsi-fungsi sosial dari mahar dan uang *panai*". Banyak orang yang menganggap bahwa mahar dan uang *panai*" dianggap sebagai "kekayaan pengantin" atau "harga pengantin". Padahal mahar dan uang *panai*" diberbagai masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Mahar dan uang *panaik*" dimanapun adalah sesuatu yang mampu membedakan mana perkawinan yang sah dan mana hubungan diluar pernikahan. Dan selanjutnya kadang-kadang mahar dan uang *panai*" membedakan pula mana konsekuensi-konsekuensi hubungan seks yang diakui masyarakat, dan mana yang tidak, baik itu keturunan, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan lainnya.

Mahar dan uang *panaik* pada masyarakat kebanyakan dianggap mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Pembayaran mahar dan uang *panaik* dianggap sebagai dari pihak laki-laki dan keluarganya. Dengan demikian berarti pembayaran mahar dan uang *panaik* merupakan imbalan dari hak-hak materi, dan pula hak-hak non materi. Bahkan seringkali mahar dan uang *panaik*

40

digunakan sebagai pencipta berbagai jalur perhubungan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi

Penelitian 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif*. Metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴¹

Berdasar pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Uang *Panaik* (Uang Belanja).

2. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: Tempat pelaku dan kegiatan.⁴² Penelitian tentang Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap uang *panaik* akan dilakukan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1) Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk didalamnya masalah biaya uang *panaik* yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam pembahasan.

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkawinan.

⁴²

S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi j. Moleong bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data yaitu⁴³ :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara obsevasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan uang *panaik*. peneliti mengamati secara lansung pada masyarakat yang paham terhadap realitas uang *panaik*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menelusuri buku-buku di berbagai perpustakaan, karya tulis ilmiah dan jurnal-jurnal yang terdapat debeberapa *website*, serta aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu *Purposive Sampling Technique* yaitu cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan. Alasan penulis menggunakan sampel tersebut karena informan memiliki ilmu dan lebih paham pada kasus yang akan diteliti. Informan yang akan di wawancarai terdiri dari 3 orang Tokoh Agama, 7 orang kelompok terpelajar, 4 orang Tokoh Masyarakat, 2 orang kelompok anak terdidik (SMA), dan 7 masyarakat biasa. Sehingga jumlah yang akan diwawancarai penulis sebanyak 23

⁴³

Munardi, *Guru Fisika*, <https://minardikitong.wordpress.com/2010/02/10/teknikpenelitiankualitatif/>, (9 Juli 2020).

orang informan.

Untuk lebih jelasnya di tunjukkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1	Tokoh agama	3	
2	Kelompok terpelajar	7	
3	Tokoh masyarakat	4	
4	Kelompok anak terdidik (SMA)	2	
5	Masyarakat biasa	7	
Jumlah	Informan	23	

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Observasi(*Pengamatan*)

Observasi yaitu teknik pengamatan atau pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Observasi untuk mendapatkan data, yaitu melakukan suatu bservasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Uang *panai*/mahar pada Adat Pernikahan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara KabupatenJeneponto.

2. Wawancara(*interview*)

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.⁴⁵ Penelitian ini juga menggunakan sistem wawancara purposive sampling, informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel atau imforman secara gejala dengan kriteria tertentu seperti Imam desa, tokoh adat, dan Masyarakat Desa Gantarang.

3. Dokumentasi

44

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia,

45

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2010), h. 333.

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: Daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, pulpen, buku catatan, dan camera.

F. Teknik Pengolahan

Data 1. Pengolaha Data

Pengolahan data di artikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

a) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b) *Display* data (*data display*)

Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih

spesifik

c) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah di peroleh. Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relefan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.

2. Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan mengurangi data memecahkan masalah yang berdasarkan data yang di peroleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklarifikasi, dan mencatat yang dihasilkn catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapatditelusuri.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Jeneponto adalah Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa.

Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5°23' - 5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Makassar. Luas wilayahnya 749,79 km² dengan kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km² atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Arung keke yakni seluas 29,91 km².

Adapun Batas-batas wilayahnya seperti pada tabel 4.1 berikut :

Sebelah Utara	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Sebelah Timur	Kabupaten Bantaeng
Sebelah Selatan	Laut Flores
Sebelah Barat	Kabupaten Takalar

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto adalah bahasa Indonesia. Menurut *Statistik Kebahasaan 2019* oleh badan

bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Jeneponto⁴⁷ yaitu bahasa Makassar, khususnya dialek Lakiung dan dialek Turatea.⁴⁸

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 Kecamatan, 31 Kelurahan dan 82 Desa. Adapun daftar kecamatan dan kelurahan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status
Arungkeke		7	Desa
Bangkala	4	10	Desa
Bangkala Barat	1	7	Desa
Batang	2	4	Desa
Binamu	12	1	Desa
Bontoramba	1	11	Desa
Kelara	5	5	Desa
Rumbia		12	Desa
Tamalatea	6	6	Desa
Tarowang		8	Desa
Turatea		11	Desa
Total	31	82	

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto (2020)

Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 sebanyak 348.138 jiwa yang terdiri dari 169.025 jiwa penduduk laki-laki dan 179.113 jiwa penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bangkala yaitu sebesar 50.650 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di semua kecamatan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini dilihat dari rasio

⁴⁷Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11. ISBN 9786028449182.

⁴⁸Wikipedia, 2020. Diakses 27 Juli 2020.

jenis kelamin (*sex ratio*) yang lebih kecil dari 100. Ratio jenis kelamin di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 sebesar 94,36%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk per Km² dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2012 sekitar 464 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binamu yaitu sekitar 766 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bangkala Barat yaitu sekitar 175 Jiwa/Km².

2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Jeneponto Perkembangan

atau pertumbuhan penduduk adalah merupakan salah satu indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 3 tahun terakhir.

Data jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 359.787 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 361.793 jiwa dan di tahun 2019 sebanyak

363.792 jiwa.⁴⁹ Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan jumlah penduduk yang tidak menentu.

3. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Perekonomian selalu menjadi salah satu sentral dan lokomotif pembangunan bidang lain, oleh sebab itu dalam penyusunan strategi pembangunan selalu dimulai dengan pemetaan serta analisa mendalam tentang kondisi perekonomian yang sedang dihadapi dan prospek pengembangannya yang didasari oleh asumsi terhadap suatu variabel yang mempengaruhi pembangunan ekonomi tersebut. Pada hal ini menjelaskan terkait kondisi keuangan dan perekonomian daerah, dimana pembiayaan dibidang sanitasi dianggarkan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah antara Lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, dan juga pada Dinas Kesehatan.⁵⁰

B. Kedudukan Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis

Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diberbagai kalangan masyarakat di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Menurut Jamal (59 tahun) tentang pengertian uang *panaik*/mahar adalah “uang yang dipakai keluarga pengantin untuk mengadakan acara atau pesta”.⁵¹

Sama Halnya dengan pernyataan Hj. Nining (61 tahun) yang mengatakan bahwa uang *panaik* adalah “uang yang diberikan kepada pihak perempuan untuk biaya menyelenggarakan pesta perkawinan”.⁵²

⁴⁹ BPS Kabupaten Jeneponto (2020). Diakses 27 Juli 2020, dari: <https://jenepontokab.bps.go.id/statictable/2017/05/17/2/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-kab-jeneponto-tahun-2010--2020.html>.

⁵⁰ <https://komunitasjnpntnet.wordpress.com> diakses pada tanggal 27 Juli 2020 jam 13.11 WITA.

⁵¹ Jamal. Padangang, Wawancara, Desa Gantarang, 23 Juli 2020.

⁵² Hj. Nining. IRT, Wawancara, Desa Gantarang, 25 Juli 2020.

Berdasarkan informasi diatas menunjukkan bahwa uang *panaik*’ menurut Jamal dan Hj. Nining adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita untuk dipergunakan dalam menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat mengadakan pesta pernikahan.

Hj. Kamaruddin (50 Tahun) menuturkan pendapatnya bahwa:

“uang *panaik*’ yaitu uang yang diberikan kepada kaum wanita dari pihak pria yang menjadi persyaratan dalam mengadakan pernikahan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan”.⁵³

Menurut Madding (47 tahun) uang *panaik* sangat penting untuk kelangsungan pesta pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, maka permintaan uang *panaik* dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Uang *panaik* merupakan adat kebiasaan yang turun temurun mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Jeneponto merupakan salah satu daerah yang masih kental adat istiadat uang *panaik* dan bahkan sangat sakral dikalangan masyarakat khususnya di Desa Gantarang kecamatan kelara.⁵⁴

Pada proses lamaran, hal yang paling utama di perbincangkan adalah uang *panaik*. Jika belum tercapai kesepakatan antara dua belah pihak terkadang sampai lima kali pembahasan sampai mencapai mufakat. Biaya uang *panaik* merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah pesta perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang oleh jumlah uang panai tersebut. Baik dari jamuan makanan dan perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Jeneponto merupakan daerah suku makassar, serta sekaligus terkenal

⁵³

Hj. Kamaruddin. Guru. *Wawancara*, Desa Gantarang, 26 Juli 2020.

⁵⁴

dengan adat yang sangat mencolok dengan aktivitas masyarakatnya, termasuk di dalam masalah perkawinan yang pada prosesnya masih sangat disiplin, teliti, dan penuh pertimbangan dengan harapan agar buah hati dari perkawinan tersebut mampu melahirkan nuansa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi kedua insan yang telah terikat dalam sebuah tali perkawinan.

Tradisi uang *panaik* atau biasa yang disebut dengan uang pesta adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam kalangan suku bugis apabila ada seseorang yang ingin melamar anak perempuannya maka orang tua dari perempuan tersebut akan meminta sejumlah uang untuk digunakan dalam acara resepsi pernikahan. Uang *panaik* berbeda dengan mahar karena uang *panaik* sepenuhnya digunakan oleh orang tua perempuan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan atau walimahan. Sedangkan mahar adalah harta yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat pernikahan, harta tersebut dapat berupa uang ataupun benda dan harta tersebut sepenuhnya milik istri nantinya jadi tidak boleh diminta kembali atau digunakan tanpa izin dari istri.

1) Sejarah Tradisi uang *panaik*

Tradisi uang *panaik* terjadi karena biasanya anak perempuan di daerah perkampungan suku bugis kebanyakan waktunya dihabiskan di rumah dan dari orang tuanya juga sangat dijaga dalam pergaulan dan hubungan dengan orang lain diluar. Maka dari itu kebanyakan perempuan disana dijodohkan oleh orang tua mereka kepada kenalan atau saudara jauhnya. Karena kebanyakan pasangan disana dijodohkan maka pihak dari laki-laki tidak akan kaget saat dimintai uang *panaik* untuk digunakan sebagai dana dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Permintaan uang tersebut dianggap sebagai bentuk kesiapan dari pihak laki-laki yang melamar, bisa tidak mereka memenuhi tuntutan tersebut jika

segitu saja tidak bisa maka bagaimana nantinya saat sudah berkeluarga (Wawancara pada tanggal 26 Juli 2020).

Akan tetapi menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan, tradisi uang *panaik* terjadi karena suku bugis makassar terkenal merupakan suku yang agama Islamnya sangat kuat maka dari itu mereka mungkin mengikuti adat budaya bangsa Arab *modern* sesudah jaman Nabi dan para sahabatnya yaitu kebiasaan yang dinamakan *milka*. *Milka* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah calon mempelai wanitanya, dimana setelah melamar calon mempelai laki-laki tersebut akan pergi merantau selama 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, atau bahkan 1 tahun lamanya. Tujuan dan alasan dari ini semua adalah agar pengantin laki-laki siap memberikan nafkah secara lahiriyah dan batiniyah. Mereka berjuang dan bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan sang mempelai wanita atau istri. Selain itu juga untuk mempersiapkan acara puncak yaitu resepsi pernikahan. Karena acara puncak tersebut dilakukan secara megah dan mewah sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit.⁵⁵

Karena adanya kebiasaan *milka* pada masyarakat Arab tersebut maka para orang tua dari suku bugis juga ingin anaknya nanti menikah dengan orang yang siap secara materilal ataupun immaterial dengan cara meminta sejumlah uang kepada pihak laki-laki saat anaknya dilamar. Hal ini juga yang menyebabkan kebanyakan orang bugis ingin anak perempuannya melangsungkan acara resepsi pernikahan secara besar-besaran.

2) Proses tradisi uang *panaik*

Dalam proses uang *panaik* pertama dimulai ketika keluarga pria datang

⁵⁵ Mujibarruhman.(2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaiik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis Distrik wanggar Kabupaten Nabire*. Diperoleh: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3315/1/Anriani.pdf>. Diakses 26 Juli 2020.

untuk melamar maka disana para keluarga akan musyawarah untuk menentukan berapa besar uang panaik. Biasanya yang mematok atau menentukan berapa besar uang yang harus dikeluarkan adalah ayah atau jika tidak ada maka wali terdekat dari si wanita atau bisa juga seseorang yang penting dalam keluarganya disana biasa disebut yang dituakan. Apabila setelah musyawarah tidak ditemukan satu titik temu maka pernikahan dapat menjadi batal. Maka dari itu para laki-laki disanaharus pintar-pintar dalam mencari calon istri mereka harus melihat latar

56

belakang calon mereka dan harus berani mengambil resiko.

Uang *panaik* sesungguhnya adalah uang yang diberikan calon suami kepada keluarga perempuan untuk digunakan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Uang tersebut sepenuhnya untuk pesta nikah tidak ada hubungannya dengan mahar, jadi apabila uang tersebut lebih dalam melnsungkan acara resepsi pernikahan tersebut maka uang tersebut otomatis akan menjadi milik orang tua atau keluarga mempelai wanita. Uang *panik* tersebut tidak harus dalam bentuk uang bisa dengan sapi atau emas yang penting apabila dijumlahkan sesuai

57

dengan kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan saat melamar.

3) Penentuan uang *panaik*

Dalam penentuan *panaik* biasanya yang menjadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya uang panaik adalah pendidikan akhir si wanita, latar belakang oaring tua dan lingkungan masyarakat sekitar (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2020).

- Pasangan Alwi dan Reski

Pasangan ini menikah di Desa Gantarang pada tahun 2017 dengan jumlah

⁵⁶ Hj. Saleh. Pedagang, *Wawancara*, Desa Gantarang 27 Juli 2020.

⁵⁷ Muis. PNS, *Wawancara*, Desa Gantarang, 27 Juli 2020.

uang *panaik* yang diminta adalah 15 juta rupiah. Uang yang diminta 15 juta karena sang istri yaitu Reski merupakan lulusan S1 sedangkan latar belakang keluarganya adalah orang biasa yaitu orang tuanya bekerja sebagai pedagang sekaligus penjahit. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah karena pernikahan tersebut tidak dilangsungkan di kampung halaman mempelai wanita yaitu di Makassar jadi menurut orang tua dari mempelai wanita sudah tidak relevan untuk meminta uang *panaik* yang sebesar sesuai dengan yang ada di Makassar.

Untuk sekarang menurut dari keterangan Nawir saudara dari ayahnya yang berada di Makassar dengan pendidikan akhir lulusan D3 jumlah uang *panaik* yang diminta adalah 25 juta rupiah.

- Pasangan Wiwin dan Iswadi

Mereka menikah di Makassar pada tahun 1989 dengan jumlah uang *panaik* yang diminta adalah 800.000 rupiah. Uang yang diminta 800.000 rupiah karena mereka berasal dari latar belakang orang tua yang biasa sedangkan untuk pendidikan jaman dulu belum terlalu diperhatikan apalagi untuk anak perempuan jadi yang mempengaruhi besar uang yang diminta adalah hanya dari latar belakang orang tua.

Walaupun ini sudah dilakukan secara turun temurun sebetulnya tokoh agama disana kurang setuju dengan adat tersebut anak-anak mereka biasanya kalau hendak menikah tidak diminta uang *panaik*. Hal ini dikarenakan menurut mereka uang *panaik* dianggap memberatkan dan dapat mengganggu anjuran agama yaitu Q.S An-Nuur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”⁵⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan untuk seseorang yang pria ataupun wanita yang sudah layak dalam hal ini baik dari segi umur mental dan rezeki dianjurkan untuk segerah menikah dan bagi keluarga atau orang-orang terdekatnya untuk membantu agar orang-orang tersebut segera menikah. Jadi apabila sudah layak untuk menikah segerelah dinikahkan tak perlu ditambahkan sayarat-syarat yang berlebihan atau hal-hal yang memberatkan lainnya.

Untuk tujuan dari adanya uang *panaik* sendiri terdapat perbedaan pendapat dari narasumber yang ditanya, ada yang berpendapat bahwa pemberian uang *panaik* adalah simbol bahwa laki-laki tersebut serius dan mampu untuk menafkahi secara lahiriyah dan *batiniyah* terhadap perempuan tersebut sedangkan yang lain berpendapat bahwa uang *panik* tersebut tidak ada maksud dan tujuan tertentu itu hanya dilakukan secara turun temurun.

Untuk sekarang tradisi uang *panaik* ini kebanyakan hanya terjadi di daerah kampung-kampung atau desa saja sedangkan untuk daerah kota sudah jarang dilakukan karena anak-anak mereka kebanyakan sekolah diluar daerah seperti di Jawa atau kota-kota lainnya. Para laki-laki tentunya akan lebih memilih mencari istri dari daerah lain sedangkan untuk perempuan setelah mengetahui berbagai

⁵⁸ Q.S An-Nuur (24) ayat 32.

tradisi di daerah lain tidak akan mau dijodohkan dan lebih memilih mencari calon sendiri tanpa meminta uang *panaik*.⁵⁹

Terkait dengan sosial budaya uang *panaik* untuk menikahi perempuan Suku Bugis Makassar, salah satu dampak dari pemberian uang *panaik* adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi pihak perempuan jika jumlah uang *panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Penghormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada wanita dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membiayai pesta perkawinan tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok uang *panaik* dengan jumlah yang tinggi.

Dari tingginya jumlah uang *panaik* yang ditentukan tersebut, memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak dari tingginya uang *panaik* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Dampak positif dari tingginya uang *panaik* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Bugis Makassar, memenuhi jumlah uang *panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *Siri* (malu), dimana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi uang *panaik* yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. Sehingga perempuan yang benar-benar

⁵⁹ Hj. Sahar. Pedagang, Wawancara, Desa Gantarang, 27 Juli 2020.

dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah uang *panaik* yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagai pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah uang *panaik*, yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

Dari data wawancara dengan Amiruddin (47 Tahun) mengatakan bahwa:

“Dampak positifnya, dapat mempermudah pelaksanaan perkawinan utamanya bagi kaum perempuan. Dampak negatifnya biasanya terjadi pada kaum laki-laki, apabila uang *panaik* dipaksakan maka dari pihak laki-laki akan menjadi beban nantinya setelah melaksanakan perkawinan karena biasanya uang *panaik* itu berasal dari uang pinjaman atau secara terpaksa karena ingin betul-betul melakukan perkawinan dengan perempuan

(pasangannya).

Dari penuturan informan diatas bahwa, secara umum ada dua dampak yang terkandung dalam pemberian uang *panaik* yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dijelaskannya ialah mempermudah proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk tercapainya perkawinan. Dampak negatif dari penuturan Amiruddin yaitu jika uang *panaik* yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita *relative* tinggi maka akan menjadi beban secara materi bagi pihak keluarga pria karena terkadang uang *panaik* yang disanggupi pihak pria sebagian berasal dari pinjaman atau sumbangan dari kerabat keluarga laki-laki. Akan tetapi jika keluarga laki-laki tidak dapat menyanggupi uang *panaik* yang ditentukan maka akan menjadi malu bahkan hubungan antara pria dengan wanita tersebut akan berakhir.

Dari penuturan Ismail (62 Tahun) mengatakan bahwa:

“Dampak dari pemberian uang panai yaitu apabila uang panai’ yang ditentukan itu tinggi, maka akan berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan sosial ekonominya menengah kebawah akan merasa

semakin berat dalam hal pernikahan”.⁶¹

Dari hasil wawancara terhadap informan, menjelaskan bahwa uang *panaik* yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi Sunnah Rasulullah SAW yaitu pernikahan.

2. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang *panaik* yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang *panaik* yang disyaratkan tersebut.

Tingginya uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga wanita dapat berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Bugis Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang pria dan wanita menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang *panaik* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak pria tidak mampu menyanggupi jumlah uang *panaik* yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya yang akan muncul adalah pihak keluarga pria dan wanita akan mendapat cibiran atau hinaan dari kalangan masyarakat setempat.

Adapun pendapat dari Muslimin (61 Tahun) bahwa:

“Kalau uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat disanggupi oleh pihak keluarga pria maka menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga dan kerabat dari pihak pria dalam hal ini dipandang sebagai praktik budaya yang dianut selama ini. Tetapi jika uang *panaik* yang dipatok tidak dapat dipenuhi oleh pihak pria lantaran terlalu tinggi

⁶¹ Ismail. Pedagang, Wawancara, Desa Gantarang, 28 Juli 2020.

biasanya terjadi hal yang tidak diinginkan yang disebut *Silariang* (kawin lari).⁶²

Dari penjelasan informan diatas bahwa dampak dari uang *panaik* dapat dilihat suatu kebanggaan oleh pihak keluarga pria apabila sanggup memenuhi uang *panaik* yang sudah ditentukan. Akan tetapi jika uang *panaik* justru menjadi penghambat dan memberatkan pihak pria, maka tidak jarang ada beberapa pasangan yang memilih untuk menyimpang dari adat istiadat Suku Bugis Makassar yang dipegang teguh selama ini.

C. Hukum Islam tentang Uang *Panaik* Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis

Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara KabupatenJeneponto

Uang *panaik* adalah uang yang diminta oleh orang tua atau keluarga dari si wanita dimana uang tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat menikahi wanita tersebut. Uang tersebut akan digunakan oleh keluarga perempuan untuk mengadakan acara resepsi pernikahan atau walimahan, uang yang diminta juga biasanya sangat berlebihan dan dianggap menyusahkan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan para orang tua disana ingin melihat anak mereka menikah dengan orang yang baik secara akhlak perilaku maupun secara materi apalagi jika mereka hanya memiliki seorang anak perempuan maka mereka sangat menginginkan mengadakan acara resepsi pernikahan secara besar-besaran.

Walimah atau resepsi pernikahan adalah suatu acara yang dilaksanakan oleh keluarga yang melangsungkan pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah pasangan suami istri tersebut. Acara tersebut biasanya hanya berupa makan-makan dan mengucapkan selamat kepada pasangan suami istri tersebut.

Dalam Islam hukum menyelenggarakan *walimah* (pesta pernikahan)

⁶² Muslimin. Petani, Wawancara, Desa Gantarang, 28 Juli 2020.

merupakan hal yang *mustahabah* (dianjurkan). Berkata Anas r.a.: “Pada suatu hari Rasulullah SAW. melihat tanda-tanda pengantin pada diri Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya: “Apa ini?” jawab Abdurrahman: “saya baru saja mengawini seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji korma”. Mendengar itu beliau berkata: “Barakallahu laka (semoga Allah memberkatimu). Selenngarakanlah walimah walau hanya dengan seekor domba”⁶³.

Dari riwayat diatas kita mengetahui bahwa walimah itu dianjurkan akan tetapi Nabi tidak mengatakan tentang batasan dalam menyelenggarakan walimah, Nabi hanya menganjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti domba, kambing atau yang lainnya. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam tradisi yang berkaitan tentang walimah atau resepsi pernikahan.

Dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Majah yang diterjemahkan oleh Drs.M. Thalib disitu dikatakan bahwa jangan sampai mengadakan walimah secara berlebih-lebihan, apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan, karena hal semacam itu sudah berubah menjadi perbuatan syirik (Thalib, 1993 dalam Mujiburrahman, 2018).⁶⁴

Kelayakan untuk menikah atau hukum Islam dalam menikah itu ada 5 yaitu:

1. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila

⁶³ Al-baqir, muhammad. 1992. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma.

⁶⁴ M. Mujiburrahman. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik(Uang Pesta)Dalam Pernikahan Kalangan SukuBugis (Studi Kasus Di Kampung Wiraska, DistrikWanggar, Kabupaten Nabire)*.

tidak kawin, akan tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, maka bagi orang itu melakukan perkawinan hukumnya wajib. Qa“idah fiqhiyah mengatakan: “sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu yang wajib”, atau dengan kata lain: “apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, maka hal itu wajib pula hukumnya.” Pentrapan qa“idah tersebut dalam masalah perkawinan adalah, apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan tersebut wajib hukumnya.

2. Perkawinan yang *Sunnah*

Perkawinan hukumnya sunnat bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran atas perbuatan zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana disebutkan didalamnya bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan.

3. Perkawinan yang Haram

Perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

4. Perkawinan yang *Makruh*

Perkawinan hukumnya *makruh* bagi seorang yang mampu dalam segi

materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isterinya; misalnya calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.

5. Perkawinan yang *Mubah*

Perkawinan hukumnya *mubah* bagi orang-orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan perbuatan zina dan andaikan kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi *syahwat* dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁶⁵

Maka dari itu sebaiknya kita janganlah menyusahkan orang-orang yang seharusnya sudah saatnya untuk menikah dan ingin melamar anak kita dengan harus memberi syarat yang berlebihan seperti, harus memberikan sejumlah uang atau persyaratan-persyaratan lain yang akan menyausahkan mereka. Pernikahan merupakan anjuran dan salah satu bentuk ibadah jika diniati dengan benar dan sesuai dengan ayat diatas bahwasanya apabila calon suami dalam keadaan yang kekurangan maka Allah akan membantunya dengan karunia-Nya. Larangan untuk

⁶⁵ Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

memberi kesusahan kepada orang lain juga telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya: *“Barang siapa yang membawa mudharat maka Allah akan memudharatkan dirinya sendiri, sesiapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkannya pula”* (HR. Tirmidzi).

Juga dalam penggalan Ayat Al-Qura’an surat At-Talaq Ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: ...dan janganlah kamu menyusahkan (memudharatkan) mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁶⁶

Agama Islam juga menganjurkan untuk tidak berperilaku berlebih-lebihan dalam segala hal seperti yang telah dituliskan dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 31 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.⁶⁷

Juga dalam riwayatnya dari “Amr bin Syu’aib, Rasulullah SAW bersabda:

“Hendaklah kalian makan dan minum dan bersedekah tanpa berlebih dan sombong. Sesungguhnya Allah menyukai melihat nikmat Nya pada hambaNya yang diberi nikmat”.⁶⁸

Berlebih-lebihan dalam Islam merupakan perilaku yang tercela dan

⁶⁶ Q.S At-Talaq Ayat 6

⁶⁷ Q.S. Al-A’raf:31.

⁶⁸ HR Al-Hakim

dilarang oleh syariat Islam, hal ini dikarenakan tidak akan menimbulkan kebaikan sama sekali dan bahkan akan menimbulkan berbagai macam hal-hal buruk seperti mendatangkan sifat *riya* bagi yang melakukan dan menimbulkan sifat iri dan dengki bagi orang yang melihat.

Menyelenggarakan *walimah* adalah salah satu macam ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasul. Oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah tersebut. Agar *walimah* benar-benar bernilai ibadah, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan *walimah* disesuaikan dengan kemampuan, tidak memaksa diri diluar kekuatan yang akan berakibat penyesalan, dan tidak berlebih-lebihan yang berkecendrungan kepada kemewahan.
- b. Menyelenggarakan *walimah* dengan ikhlas, untuk *ittiba'* kepada sunnah Rasul, tidak bermotif komersil, tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sumbangan yang datang diterima dengan senang hati dan terima kasih serta dipandang sebagai pernyataan kasih sayang dari para tamu undangan, bukan sebagai “karcis masuk” memenuhi undangan *walimah*.

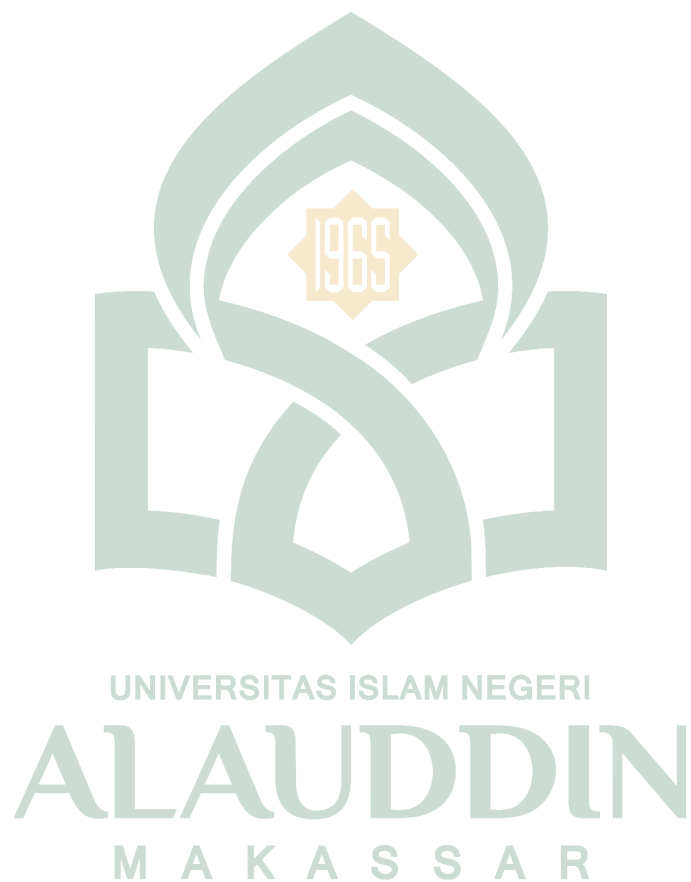
Para undangan yang menghadiri *walimah* apabila mampu, baik membawa hadiah (kado) sekedarnya, tetapi jangan sampai dirasakan sebagai kewajiban yang memberatkan. Kewajiban memenuhi undangan jangan sampai terhalang hanya oleh karena tidak mampu membawa hadiah (kado). Nama penyumbang tidak mutlak disertakan dalam bungkusan hadiah (kado) yang dibawanya. Sumbangan tanpa nama lebih menjamin keikhlasan. Apabila kartu nama disertakan juga, jangan sampai atas dorongan rasa takut dikira tidak menyumbang.

- c. Tamu-tamu disambut dengan rasa hormat dan terima kasih, tanpa

dibedakan antara yang membawa kado dan yang tidak membawa sama sekali. Daftar tamu sering dirasakan perlu oleh pihak pengundang sebagai kenang-kenangan, tetapi sering pula dirasakan sebagai daftar hadir oleh para tamu, untuk diketahui siapa yang datang dan siapa yang tidak. Oleh karena itu lebih disyogikan tidak usah disediakan daftar tamu, agar keikhlasan kedua belah pihak, pengundang dan yang diundang tetap terpelihara.

- d. Tidak ada halangannya diadakan selingan hiburan, tetapi tidak berakibatkan menyakkan nafas para tamu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.
- e. Adat istiadat yang merupakan lambang-lambang tradisional, tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak usah dihidupkan, seperti menyebar beras, memecah telur di kaki mempelai laki-laki, dan sebagainya. Bagaimanapun murah harga telur itu, tetapi apabila dibuang akan merupakan salah satu bentuk *tabzir*, menyalakan harta benda yang dilarang dalam agama Islam.
- f. Para tamu yang diberikan suguhan makanan supaya menerima dengan senang hati, jangan menolak: apabila sesuai dengan selera dimakan, apabila tidak sesuai dibiarkan saja. Tidak disyogikan menilai kurang (mencela) terhadap hidangan walimah, kurang ini, itu tidak enak dan sebagainya. Rasulullah saw. tidak pernah mencela makananyang dihidangkan, apabila sesuai dengan selera dimakan, apabila tidak sesuai dibiarkan.
- g. Apabila bukan karena tidak mungkin mengundang tamu-tamu yang diharapkan hadir dalam satu waktu, *walimah* hendaknya diadakan satu

kali saja pada hari pertama; terpaksa supaya dicukupkan dua kali saja, yaitu tambahan pada hari kedua. Hadits Nabi mengajarkan: “Makanan *walimah* pada hari pertama adalah *haq*, makanan pada hari kedua adalah *sunnah*, makanan pada hari ketiga adalah *riya*, barangsiapa suka memperdengarkan kebaikan kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan kepada orang lain itu keburukan-keburukannya.⁶⁹



⁶⁹ Ibid.62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan uang *panaik* dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis Makassar di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sudah menjadi tradisi kebiasaan yang turun-temurun atau tradisi mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Persepsi masyarakat uang *Panaikitu* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita untuk dipergunakan dalam menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat mengadakan pesta pernikahan. Masyarakat di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, uang *panaik* itu sudah menjadi hal yang lumrah dimana pihak wanita yang berhasil mematok uang *panaik* yang tinggi maka menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga. Begitupun sebaliknya dengan laki-laki, kalau uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat disanggupi oleh pihak keluarga maka menjadi kebanggaan bagi keluarganya dan kerabat dimana hal ini dipandang sebagai praktik budaya yang sudah dianutnya selama ini.
2. Hukum Islam tentang uang *panaik* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang *panaik* dalam Islam. Akan

tetapi hukumnya *mubah*, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Maka dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dalam menentukan uang *panaik* seharusnya, disesuaikan dengan kemampuan bagi pihak laki-laki agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan.
2. Penetapan jumlah uang *panaik* hendaknya pihak laki-laki harus memahami keadaan keluarga mempelai wanita dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (*walimah*) uang *panaik* berada pada posisi yang wajar untuk diterima. Seperti halnya di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang keadaan masyarakatnya sangat peka terhadap kebersamaan, solidaritas yang masih terjaga, maka jumlah uang *panaik* yang tinggi adalah salah satu hal yang wajar.
3. Perkawinan adalah salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Maka, dalam hal menyelenggarakan pernikahan sebaiknya nilai agama yang ditonjolkan, meskipun secara adat tidak bisa ditinggalkan secara keseluruhan, yang penting alurnya tidak bertentangan dengan norma-norma atau hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdul , G. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR* (Makassar: Indobis Publising, 2006).
- Abidin Slamet, Aminuddin.(1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Media.
- Ahmad Rofiq, M.A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Aji Damanuri, M.E.I., *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Stain Po Press, 2010).
- Al-baqir, Muhammad.(1992). *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Christian Pelras, *The Bugis* (Blackwell Publishers, 1996).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2006. *Daerah Sul-Sel* (Makassar).
- Depertemen DikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai pustaka, 1994).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan*.
- Dr. Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Cet ke-1: Jakarta Kencana 2010).
- Fuaduddin. (1999). *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR Al-Hakim.
- Husain Mazhahiri. (2001). *Bunga Dalam Rumah Tangga*. Jawa Barat: Cahaya.

Kansil C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Kementrian Agama Republik Indonesia.(2014).*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.PT. Patja Cemerlang.

Koentjaraningrat.(1990). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*.Jakarta: PT. Gramedia.

Muhammad Al Jabri, (1991). *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*.Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Muhammad Saleh Ridwan, (2011). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia.

Moh. Saifullah Al-aziz. (2006).*Fiqh Islam Lengkap*.Surabaya: Terbit Terang.

Mohammad Daud Ali. (2002).*Hukum Islam dan Peradilan Agama*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mohamad Rifa'I. (1990).*Usul fikih*.Bandung: Al Ma'arif.

M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal*.

M. Thahir Maloko.(2012).*Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*.Cet. I; Makassar AlauddinUniversity Press.

Nasrullah.(2016).*Sosiologi Hukum Islam*.Surakarta: Pusat setia.

Nasution S. (1996).*Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto.

Q.S. Al-A'raf 7:31.

Q.S An-Nuur (24) ayat 32.

Q.S At-Talaq Ayat 6.

Rasjid Sulaiman. (1987).*Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Rosady Ruslan. (2010).*Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*.Jakarta: RajawaliPers).

Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: *Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11. ISBN 9786028449182.*

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2010).
- Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007).
- Suharsimi.Arikunto. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman Rasyid. (1992). *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No . 2 Desember 2012).
- Syarifuddin Ondeng, *Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* (Makassar Alauddin Press, 2013).
- Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

2. Sumber Internet

- Admin “Pengertian Sosilogi Hukum Islam” <https://www.suduthukum.Com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses tanggal 9 Juli 2020.
- <https://www.wattpad.com/10185493-kumpulan-hadist-hadist-tentang-nikah>.9 Juli 2019.
- wikipedia. (2020, Juli 9). *Kabupaten Jeneponto*. Retrieved Juli 27, 2020, from [id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jeneponto](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jeneponto).
- BPS Kabupaten Jeneponto. (2020, Juli 9). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab. Jeneponto Tahun 2010 -2020*. Retrieved Juli 27, 2020, from [jenepontokab.bps.go.id: https://jenepontokab.bps.go.id/statistictable/2017/05/17/2/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-kab-jeneponto-tahun-2010--2020.html](https://jenepontokab.bps.go.id/statistictable/2017/05/17/2/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-kab-jeneponto-tahun-2010--2020.html).
- M. Mujibarruhman. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis Distrik wanggar Kabupaten Nabire*. Diperoleh dari: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3315/1/Anriani.pdf>. Diakses 26 Juli 2020.

<https://komunitasjnptnet.wordpress.com> diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

3. Wawancara

Amiruddin. PNS, *Wawancara*, Desa Gantarang, 27 Juli 2020.

Ismail. Pedagang, *Wawancara*, Desa Gantarang, 28 Juli 2020.

Jamal. Padagang, *Wawancara*, Desa Gantarang, 23 Juli 2020.

Hj. Kamaruddin. Guru. *Wawancara*, Desa Gantarang, 26 Juli 2020.

Hj. Nining. IRT, *Wawancara*, Desa Gantarang, 25 Juli 2020.

Hj. Sahar. Pedagang, *Wawancara*, Desa Gantarang, 27 Juli

2020. Hj. Saleh. Pedagang, *Wawancara*, Desa Gantarang 27 Juli

2020. Madding. Petani, *Wawancara*, 26 Juli 2020. Muis.

PNS, *Wawancara*, Desa Gantarang, 27 Juli 2020. Muslimin.

Petani, *Wawancara*, Desa Gantarang, 28 Juli 2020

